

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023**

BADAN KESATUAN BNGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA



VISI DAN MISI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Visi :

Meningkatkan Stabilitas Keamanan Wilayah dengan Kokohnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Sebagai Perekat NKRI yang Demokratis, Dinamis, Tentram dan Damai Lahir Batin Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945"

MISI :

1. Mewujudkan system politik yang emokratis yang berbasis pada makin berfungsinya susprastruktur dan infrastruktur politik secara efektif;
2. Mewujudkan iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis, tentram, rukun dan damai yang di topan oleh mantapnya Wawasan Kebangsaan , Ketahanan Bangsa, Falsafah Kehidupan berbangsa serta kemampuan Bela Negara segenap warga Negara;
3. Mewujudkan situasi dan kondisi yang tentram serta perilaku integritas oleh masyarakat yang kondusif untuk lancarnya penyelenggaraan pemerintah

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan bangsa Dan Politik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Februari 2023

**PI KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA**



DEKIDAS Hi SABOLLA, SH
Nip. 19690716 200012 1 004

DAFTAR ISI

1. VISI DAN MISI BADAN KESBANGPOL	i
2. PERNYATAAN TELAH DI REVIU	ii
3. KATA PENGANTAR	iii
4. DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.	1
1.2 GAMBARAN UMUM BADAN KESBANGPOL DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.	1
1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA BADAN KESBANGPOL DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA	2
1.4 STRUKTUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA	4
STRUKTUR ORGANISASI	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 RENCANA STRATEGIS BADAN KESBANGPOL	4
2.2 SISTEMATIKA TELAHAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	
2.3 VISI DAN MISI BADAN KESBANGPOL	8
2.3.1 VISI	8
2.3.2 MISI	8
2.4 SASARAN DAN TUJUAN BADAN KESBANGPOL	9
TABEL 1 TUJUAN DAN SASARAN	10
2.5 INDIKATOR KINERJA URAMA BADAN KESBANGPOL	11
TABEL 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	11
2.6 PERJANJIAN KINERJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2022	13
TABEL 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1 CAPAIAN KINERJA BADAN KESBANGPOL	15
3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021	15
TABEL 4 PENGUKURAN CAPAIAN IKU TAHUN 2021	16
TABEL 5 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	18
TABEL 6 PENCAPAIAN KINERJA SASARAN	19
TABEL 7 CAPAIAN KINERJA SASARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021	19
3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2022	24
TABEL 8 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2022	25

	3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	33
	TABEL 9 REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022	34
BAB	IV PENUTUP	36
	4.1 KESIMPULAN	36
	4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kolonodale, Februari 2023

**Pt.KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA**



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA'. The inner circle contains 'BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

DEFFIDAS HI/SABOLLA, SH
Nip. 19690716 200012 1 004

1.2 GAMBARAN UMUM BADAN KESBANGPOL DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah salah satu Lembaga Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Peraturan Bupati Morowali Utara No 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

“ Memantapkan gerakan sadar hukum dan gerakan sadar lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Morowali Utara, Kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkeadilan didukung oleh stabilitas keamanan daerah terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. “

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Bina Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik, Bidang Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas;
2. Pemberian Bahan Perizinan;;
3. Mengkoordinasikan Penyusunan Kebijakan dan Program;
4. Mengendalikan, Mengawasi dan Mengevaluasi;
5. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Bupati di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA BADAN KESBANGPOL DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya aparatur. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan isu strategi sebagai Faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah berikut:

- a. Ketersediaan Keanggotaan Forum FKUB, FKDM,dan FPK daerah untuk pengawasan Pembangunan.
- b. Ketersediaan anggota Forum FKUB, FKDM,dan FPK yang falid merupakan salah satu presyaratan dalam proses pengamanan pelaksanaan pembangunan Daerah

Kabupaten Morowali Utara.

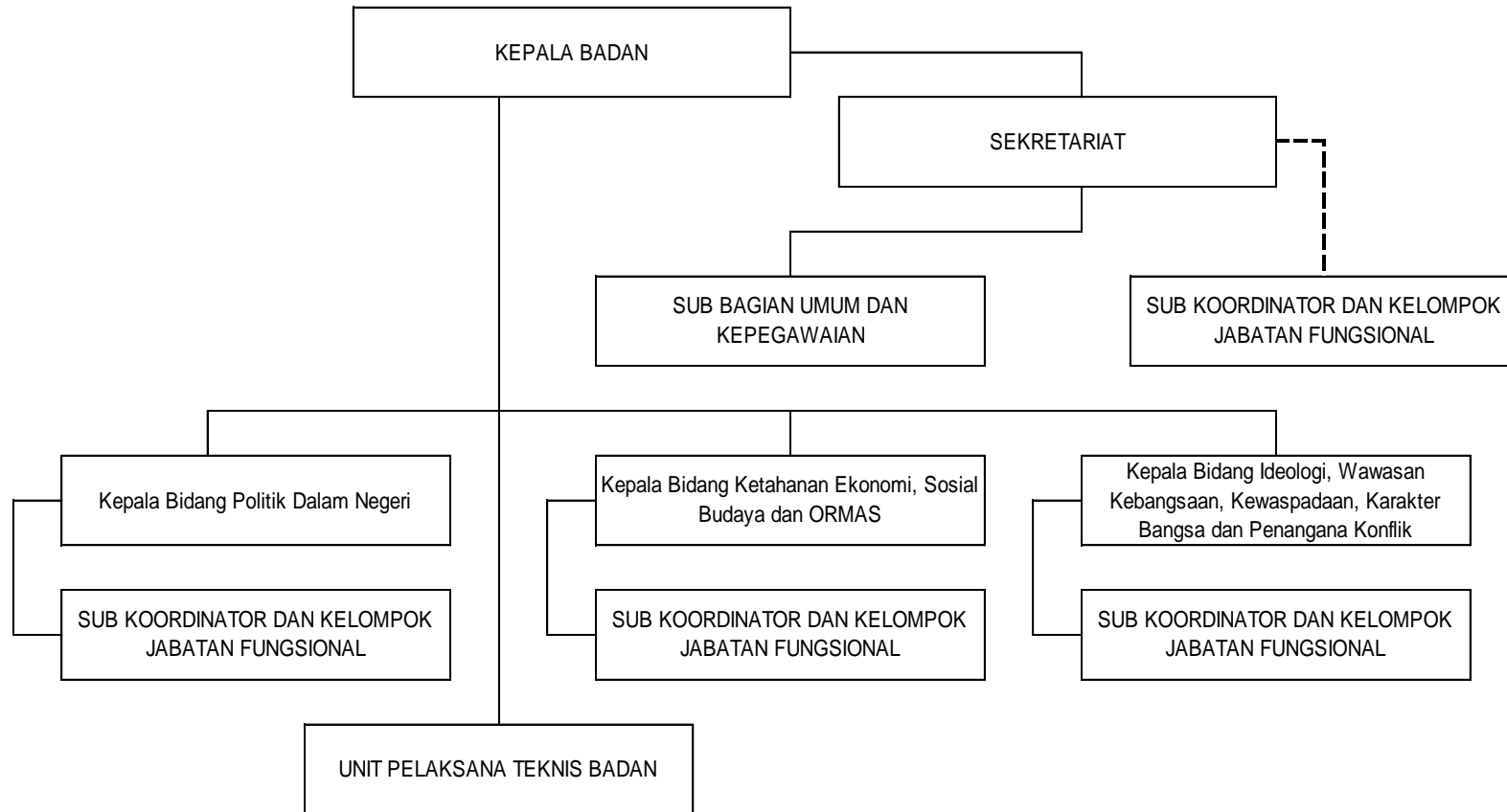
- c. Tersediannya pengawasan terhadap kelembagaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat pada Daerah Kabupaten Morowali Utara secara berkesinambungan.
- d. Ketersediaan Anggota Forum FKDM Daerah yang Solid dalam Pengawasan Orang Asing masuk di Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- e. Terlaksananya Penyuluhan FKUB antar Umat Ber Agama se Kabupaten Morowali Utara.
- f. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
- g. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

Sebagai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Badan Kesatuan bangsa dan Politik daerah baik dari aspek hukum, Politik, ketahanan ekonomi, Seni Budaya Agama, organisasi masyarakat, Kewaspadaan dini yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Organisasi Masyarakat yang belum terdaftar .
4. Peningkatan Ketahanan ekonomi, seni budaya dan agama yang belum memadai.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Badan Kesbangpol masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen modern.
7. Penataan di bidang-bidang perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Badan Kesbangpol.
9. Masih kurangnya tenaga staf organik pada Badan Kesbangpol.

1.4 STRUKTUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah memiliki Organisasi dan tata kelola Jabatan Fungsional dibawah Asisten Pemerintahan Umum terdiri dari Kepala Badan, satu Sekretaris, Satu Kasubag Umum Dan Kepegawaian , Tiga Kepala Bidang, Enam Analis, dan Pengadmistrasian susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini sesuai PERBUPMORUT lampiran 5 nomor 32 tahun 2021.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya Aparatur. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Badan Kesatuan Bangsa daan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

- a. Ketersediaan Keanggotaan Forum FKDM,FKUB,dan FPK daerah untuk pengawasan Pembangunan.
- b. Ketersediaan anggota Forum FKDM,FKUB,dan FPK yang falid merupakan salah satu presyarat dalam proses pengamanan dan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- c. Tersediannya pengawasan terhadap kelembagaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat pada Daerah Kabupaten Morowali Utara secara berkesinambungan.
- d. Ketersediaan Forum FKDM Daerah yang Solid dalam Pengawasan Orang Asing masuk di Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- e. Terlaksananya Penyuluhan FKUB antar Umat Beragama se Kabupaten Morowali Utara.
- f. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima .

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ”
Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan visi Bupati Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

2.3 VISI DAN MISI BADAN KESBANGPOL

2.3.1 VISI

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Wawasan Kebangsaan untuk mencapai tujuan Badan Kesatuan bangsa dan politik daerah sebagai salah satu instansi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Badan Kesatuan bangsa dan politik menetapkan visi “Meningkatkan Stabilitas Keamanan Wilayah dengan Kokohnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Sebagai Perekat NKRI yang Demokratis, Dinamis, Tentram dan Damai Lahir Batin Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”

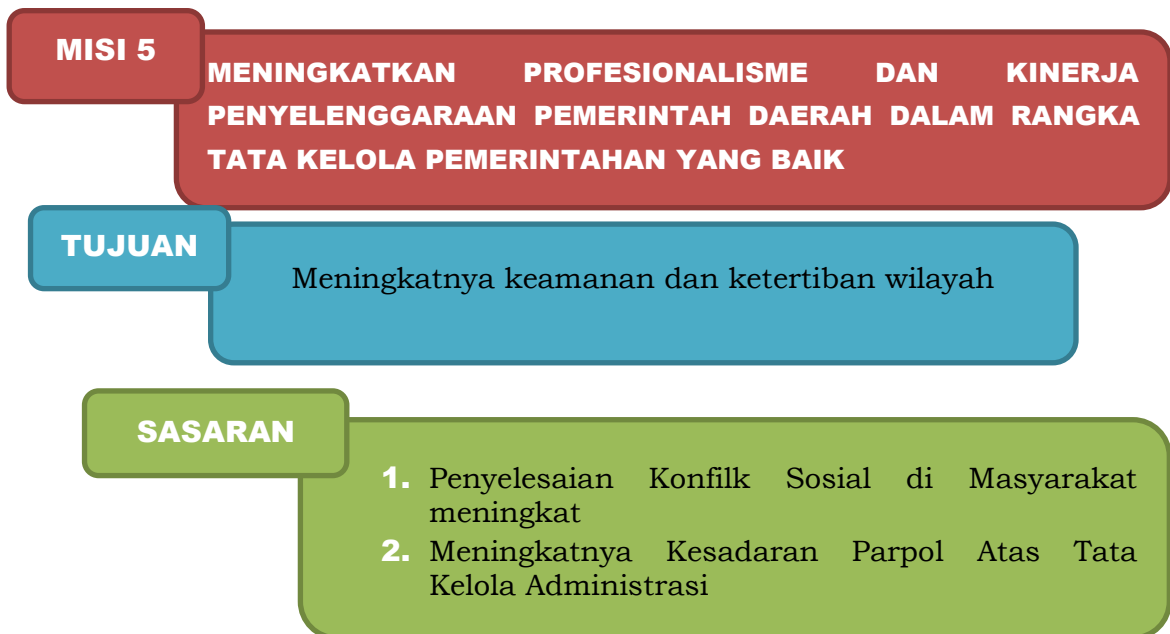
2.3.2 MISI

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan system politik yang emokratis yang berbasis pada makin berfungsinya susprastruktur dan infrastruktur politik secara efektif;
- b. Mewujudkan iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis, tentram, rukun dan damai yang di topang oleh mantapnya Wawasan Kebangsaan , Ketahanan Bangsa, Falsafah Kehidupan berbangsa serta kemampuan Bela Negara segenap warga Negara;
- c. Mewujudkan situasi dan kondisi yang tentram serta perilaku integritas oleh masyarakat yang kondusif untuk lancarnya penyelenggaraan pemerintah.

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Daerah tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah dengan kinerja kepala Daerah.



2.5 SASARAN DAN TUJUAN BADAN KESBANGPOL

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tujuan *Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah*

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Index Rasa Aman	1 Meningkatkan Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi
			2 Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat meningkat

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESBANGPOL

Badan Kesbangpol Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut :

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Formulasi IKU	Sumber Data
1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Index Rasa Aman	1 Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat meningkat	Presentase Penyelesaian Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Yang Dapat Ditangani}}{\text{Jumlah Konflik Sosial Yang terjadi}} \times 100 \%$	Laporan kegiatan
			2 Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Parpol Yang melaporkan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Parpol Seluruhnya}} \times 100\%$	Laporan kegiatan



2. PERJANJIAN KINERJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2022

Perjanjian kinerja Badan KESBANGPOL pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Badan KESBANGPOL serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan KESBANGPOL Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sbagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target(%)
1	Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat meningkat	Presentase Penyelesaian Konflik Sosial	100%
2	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	100%

No	Nama Program Kegiatan Penunjang IKU	Anggaran Rp	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,033,700,923	DAU
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya	Rp 1,957,499,500	DAU

	Politik		
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp	496,554,600
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	439,311,000

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 5.927.066.023 (Lima milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh enam ribu dua puluh tiga).**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA BADAN KESBANGPOL

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat meningkat	Presentase Penyelesaian Konflik Sosial	100%	100%	100 %	$\frac{\text{jumlah konflik yang di Selessaikan}}{\text{Total jumlah konflik}} \times 100 \%$
2.	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	100%	70%	70%	$\frac{\text{Jumlah Parpol yang menyelesaikan LPJ dana ParpolTepat waktu}}{\text{jumlah parpol yang mendapatkan bantuan Dana Parpol (Hibah)}} \times 100\%$

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebanyak 1 (Satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 2 (Dua) sasaran strategis dengan 2 (Dua) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowalui Utara tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 2 kinerja sasaran tersebut, pencapaian kerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	$91 \leq$	1	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	-	Tinggi
3	$66 \leq 75$	-	Sedang
4	$51 \leq 65$	1	Rendah
5	≤ 50	-	Sangat Rendah
	JUMLAH	2	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran Kordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: 7
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali Utara Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	91 ≥	76 ≥ 90	66 ≥ 75	51 ≥ 65	≤ 50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat meningkat	Presentase Penyelesaian Konflik Sosial	100%	100%	100%	√				
2	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	100%	70%	70 %				√	
Capaian Rata-Rata					70 %	√				

3.1.1 Sasaran Pertama Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat meningkat

Sasaran Pertama Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat meningkat Pada Badan Kesabangpol. Dapat Dilihat Dari Indikator Yaitu; Presentase Penyelesaian Konflik Sosial yang di dukung dengan Kerja Sama Antar OPD dan instansi Terkait yang didukung dengan Komunikasi yang Sejalan dengan Misi Bupati Periode 2021-2026, dengan pencapaian kinerja rata-rata **100%** dengan predikat Tinggi.

3.1.2 Sasaran Ke Dua Meningkatkan Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi Pada Badan Kesabangpol. Dapat Dilihat Dari Indikator Yaitu; Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu, Hanya mendapatkan pencapaian Kinerja

58,33 % Yang dikarenakan Konsolidasi dan Konsultasi Serta peran Penerima Bantuan Parpol Belum Memahaminya tata kerja dalam Penyusunan Laporan Hasil Pertanggung Jawaban (LHP) Bantuan dana Parpol sehingga kedepan Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah akan Melakukan Kegiatan Sosialisasi kepada Parpol yang mendapatkan Hibah dari Pemerintah.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN 2021-2022	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
1	Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat meningkat	Presentase Penyelesaian Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	100%-	100%	70%	70%

Dari table diatas kita melihat terdapat Tabel dalam Pengukuran Kinerja pada Tahun 2021 yang dikarenakan Perubahan Rensra Bupati Terpilih Dengan Periode 2021-2026 , Dimana Penyusunan indicator Mengalami perubahan sasaran dan Indicator pada tahun 2022 sehingga pengukuran kinerja tidak dapat Mengukur kinerja pada tahun 2021, Untuk tahun 2022 kita dapat melihat target dan capaian yang dimana Indikator dan sasaran sudah direvisi dan tahun 2022 “Nilai Akuntabilitas Kinerja Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah menjelaskan masing-masing indikator sebagai Berikut:

1. Presentase Penyelesaian Konflik Sosial

Pada Tahun 2022 kita dapat Melihat target Capaian Kinerja Tahun 2022 yang di targetkan 100% berhasil di capai dengan hasil yang memuaskan yang di karenakan Komunikasi Antar OPD dan Instansi yang terjalin Melalui Pembentukan 4 Forum serta Kegiatan Pencegahan dapat dilakukan dan binaan yang ada pada badan Kesatuan bangsa Dan politik daerah Kabupaten Morowali Utara



2. Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu

3.1.3 Pada Tabel diatas kita dapat melihat Indikator Kinerja pada Tahun 2022 hanya mendapatkan target Capaian kinerja **70%** dari 100% yang di targetkan Yang dikarenakan Konsolidasi dan Konsultasi Serta peran Penerima Bantuan Parpol Belum Memahaminya tata kerja dalam Penyusunan Laporan Hasil Pertanggung Jawaban (LHP) Bantuan dana Parpol sehingga kedepan Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah akan Melakukan Kegiatan Sosialisasi kepada Parpol yang mendapatkan Hibah dari Pemerintah.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 Dengan (RENSTRA)

Table 1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA 2021-2026	Realisasi Tahun 2022	Capaian
1.	Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat meningkat	Presentase Penyelesaian Konflik Sosial	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	100%	70%	70%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya $\geq 100\%$
- 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya $\geq 65\%$



3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Keuangan (Tabel)

Dalam Tahun Anggaran 2022 berdasarkan DPPA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 5.927.066.023** yang bersumber dari APBD kab. Morut dialokasikan untuk :

➤ **BTL Rp 1.994.265.506**

➤ **BL Rp. 3.932.800.517**

Pada tahun anggaran 2022 anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	1.994.265.506
2	Belanja Langsung	3.932.800.517
3	Alokasi Total Belanja	5.927.066.023

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang PNS, 13 (Tiga Belas) orang tenaga honorer

3.5 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
4. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

3.6 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Table 2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
Terwujudnya Pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 	1.068.435.417	1.051.183.365	98,39%
Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik 	1.957.499.500	1.936.780.000	98,94%

Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya 	496.554.600	427.492.000	86,09%
	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial 	439.311.000	438.063.314	99,72%

BAB IV PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 Memiliki 2 Indikator Dengan Nilai Sangat Baik.

1.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap bangsa dan negara khususnya daerah Kabupaten Morowali Utara.

**PI. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

DEFRIDAS HI SABOLLA, SH
Nip. 19690716 200012 1 004